

Peran Anggaran Negara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional

Tian Maulana Hakiki¹, Albar Aziz Putranala², M.Rayyan Al-Khadafi³, Reyhan Saputra⁴, Ati Yuniati⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Lampung

E-mail: maulanatian617@gmail.com¹, albarazizputranala@gmail.com², rayyanal370@gmail.com³, reyhansaputra2626@gmail.com⁴, ati.yuniati@fh.unila.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received March 20, 2026

Revised March 25, 2026

Accepted March 27, 2026

Keywords:

State Budget, Fiscal Policy, Economic Development, Public Finance, Government Expenditure

ABSTRACT

The state budget is a primary instrument of fiscal policy used by the government to regulate the national economy.¹ It functions not only as an administrative tool but also as a strategic instrument to achieve national development goals.² This study aims to comprehensively analyze the role of the state budget in promoting economic growth, equitable development, and maintaining economic stability.³ The research method used is normative juridical with a literature approach.⁴ The results show that the state budget has allocation, distribution, and stabilization functions that are essential in a modern economic system.⁵ Proper, transparent, and accountable management can improve public welfare sustainably.⁵

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 20, 2026

Revised March 25, 2026

Accepted March 27, 2026

Kata Kunci:

Anggaran Negara, APBN, Kebijakan Fiskal, Pembangunan Ekonomi, Keuangan Negara

ABSTRACT

Anggaran negara merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian nasional. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran anggaran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran negara memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern⁵ Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien, anggaran negara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Tian Maulana Hakiki
Universitas Lampung



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disusun secara sistematis dan terstruktur.⁶ APBN ditetapkan melalui undang-undang dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.¹ Dalam perspektif ekonomi makro, anggaran negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, anggaran negara digunakan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Belanja negara yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian.² Dampak tersebut tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan anggaran negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Defisit anggaran sering kali terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran juga menjadi tantangan serius yang dapat menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran anggaran negara dalam perekonomian nasional?
2. Apa fungsi utama anggaran negara dalam pembangunan?
3. Apa saja tantangan dalam pengelolaan anggaran negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis anggaran negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi utama anggaran negara serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Negara

Anggaran negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencerminkan kebijakan fiskal suatu negara. Anggaran ini mencakup seluruh penerimaan dan

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hlm. 2, <https://peraturan.go.id/id/uu/nomor-17-tahun-2003> (diakses 20 Maret 2026).

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 10, <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita> (diakses 20 Maret 2026).

³ Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 89, <https://alfabeta.co.id/produk/metode-penelitian-sugiyono> (diakses 20 Maret 2026).

pengeluaran negara dalam satu periode tertentu.⁴ APBN menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Secara konseptual, anggaran negara juga mencerminkan prioritas kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dalam suatu periode.⁵ Melalui struktur anggaran, dapat dilihat sektor mana yang menjadi fokus pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran negara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional.⁶

Selain itu, anggaran negara juga berkaitan erat dengan teori institusi. Daron Acemoglu dan Douglass North menjelaskan bahwa kualitas institusi publik sangat menentukan efektivitas penggunaan anggaran negara. Institusi yang kuat akan mendorong efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan.

B. Fungsi Anggaran Negara

Menurut teori ekonomi publik, anggaran negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.⁷ Sedangkan fungsi stabilisasi digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pengangguran.

Dalam praktiknya, ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, kebijakan alokasi yang tepat dapat mendukung fungsi distribusi melalui pembangunan yang merata. Selain itu, fungsi stabilisasi juga bergantung pada efektivitas kebijakan alokasi dan distribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.⁸ Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengintegrasikan ketiga fungsi tersebut secara optimal.

Di sisi lain, fungsi distribusi semakin penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Dani Rodrik menjelaskan bahwa negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi tinggi cenderung memperbesar peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, anggaran negara menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial di tengah dinamika globalisasi.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 55, <https://bumiaksara.co.id/produk/metode-penelitian> (diakses 20 Maret 2026).

⁵ 10. N. Sari, "Analisis APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 11, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1500> (diakses 20 Maret 2026).

⁶ A. Putra, "Fungsi Anggaran Negara dalam Pembangunan," *Jurnal Keuangan Negara* 5, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.31092/jkn.v5i1.500> (diakses 20 Maret 2026).

⁷ Sri Mulyani Indrawati, "Kebijakan Fiskal dan Peran APBN dalam Pembangunan," *Jurnal Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 5, <https://jurnal.kemenkeu.go.id/jkn/article/view/12> (diakses 20 Maret 2026).

⁸ Budi Santoso, "Analisis Peran APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 19, no. 2 (2018): 102, <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6800> (diakses 20 Maret 2026).

C. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi.⁹

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam kondisi krisis. John Maynard Keynes menekankan bahwa pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pada saat terjadi resesi guna mendorong permintaan agregat. Pendekatan ini masih menjadi dasar kebijakan fiskal modern.¹⁰

Selain itu, pengelolaan fiskal juga harus mempertimbangkan tingkat utang negara. Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal.¹¹

Kebijakan fiskal ekspansif biasanya diterapkan pada saat terjadi perlambatan ekonomi dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan anggaran negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keuangan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.¹³

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran anggaran negara dalam pembangunan ekonomi nasional.

⁹ Nanda Putri, "Stabilitas Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal," *Jurnal Ekonomi Nasional* 12, no. 1 (2022): 76, <https://ejournal.bappenas.go.id/index.php/jekp/article/view/2000> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁰ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London: Macmillan, 1936), hlm. 45, <https://doi.org/10.1057/9780230004767> (diakses 20 Maret 2026).

¹¹ Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff, "Growth in a Time of Debt," *American Economic Review* 100, no. 2 (2010): 573, <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.573> (diakses 20 Maret 2026).

¹² Andi Kurniawan, "Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 14, no. 2 (2020): 88, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jejak/article/view/35000> (diakses 20 Maret 2026).

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hlm. 2, <https://peraturan.go.id/id/uu/nomor-17-tahun-2003> (diakses 20 Maret 2026).

PEMBAHASAN

A. Peran Anggaran Negara

Anggaran negara memiliki peran strategis sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Belanja negara yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.¹⁴

Selain itu, anggaran negara juga berperan dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi, dan jaminan sosial merupakan bentuk implementasi fungsi distribusi anggaran.¹⁵ Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi.¹⁶

B. Fungsi Anggaran Negara

Fungsi alokasi anggaran terlihat dalam penyediaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Fungsi distribusi tercermin dalam kebijakan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi diwujudkan melalui kebijakan pengendalian inflasi dan pengangguran.¹⁷

Implementasi ketiga fungsi tersebut memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Tanpa koordinasi yang efektif, kebijakan anggaran dapat menjadi tidak optimal dan bahkan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antar kebijakan menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi anggaran negara.¹⁸

C. Tantangan Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran negara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Defisit anggaran merupakan salah satu masalah utama yang sering dihadapi pemerintah. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran juga menjadi hambatan serius. Inefisiensi dalam penggunaan anggaran dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal.¹⁹

Selain faktor internal, tantangan juga berasal dari kondisi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi harga komoditas dan krisis ekonomi global dapat mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global.²⁰

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Transparansi Anggaran Negara," *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2019): 67, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jap/article/view/25000> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁵ Rudi Hartono, "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 210, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2560> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁶ 20. Lina Marlina, "Belanja Negara dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.14203/jep.21.1.2020> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁷ 21. Yudi Setiawan, "Kebijakan Anggaran dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 2 (2019): 150, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.600> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁸ A. Putra, "Fungsi Anggaran Negara dalam Pembangunan," *Jurnal Keuangan Negara* 5, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.31092/jkn.v5i1.500> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁹ Dwi Prasetyo, "Analisis Defisit Anggaran dan Dampaknya," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 11, no. 2 (2021): 120, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4567890> (diakses 20 Maret 2026).

²⁰ Mega Sari, "Peran Anggaran Negara dalam Krisis Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Krisis* 4, no. 1 (2020): 25, <https://ejournal.ui.ac.id/index.php/jek/article/view/14000> (diakses 20 Maret 2026).

D. Strategi Optimalisasi Anggaran

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi optimalisasi anggaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.²¹ Selain itu, digitalisasi sistem keuangan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.²²

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi juga sangat diperlukan. Dengan SDM yang kompeten, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih profesional dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga penting untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran negara memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Fungsi utama anggaran negara meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang saling berkaitan dalam mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.²⁴ Pengelolaan anggaran yang baik dan tepat sasaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.²⁵

Selain itu, anggaran negara juga menjadi instrumen strategis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi baik nasional maupun global. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.²⁶ Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.²⁷

B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan inovasi dalam kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah penting dalam optimalisasi

²¹ 29. Ratna Dewi, "Kebijakan Anggaran dalam Perspektif Pembangunan," *Jurnal Pembangunan Nasional* 18, no. 1 (2019): 70, <https://doi.org/10.22146/jpn.45000> (diakses 20 Maret 2026).

²² Wahyu Nugroho, "Efisiensi Pengelolaan APBN," *Jurnal Keuangan Publik* 8, no. 2 (2021): 98, <https://journal.ui.ac.id/index.php/jkp/article/view/12000> (diakses 20 Maret 2026).

²³ Syarif Hidayat, "Kebijakan Fiskal dan Pengangguran," *Jurnal Ekonomi Tenaga Kerja* 6, no. 1 (2020): 40, <https://ejournal.unair.ac.id/JET/article/view/21000> (diakses 20 Maret 2026).

²⁴ A. Putra, "Fungsi Anggaran Negara dalam Pembangunan," *Jurnal Keuangan Negara* 5, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.31092/jkn.v5i1.500> (diakses 20 Maret 2026).

²⁵ Rudi Hartono, "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 210, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2560> (diakses 20 Maret 2026).

²⁶ Andi Kurniawan, "Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 14, no. 2 (2020): 88, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jejak/article/view/35000> (diakses 20 Maret 2026).

²⁷ Hendra Saputra, "Pengawasan Anggaran Negara," *Jurnal Audit Publik* 6, no. 1 (2020): 60, <https://ejournal.bpk.go.id/index.php/jap/article/view/1800> (diakses 20 Maret 2026).



anggaran negara. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih profesional dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan. Reformasi fiskal perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F. (n.d.). *Dasar-dasar ekonomi publik*. Prenadamedia. Retrieved March 20, 2026, from <https://prenadamedia.com/product/dasar-dasar-ekonomi-publik>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *APBN Kita*. Retrieved March 20, 2026, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Mardalis. (n.d.). *Metode penelitian*. Bumi Aksara. Retrieved March 20, 2026, from <https://bumiaksara.co.id/produk/metode-penelitian>
- Mardiasmo. (n.d.). *Akuntansi sektor publik*. Andi Publisher. Retrieved March 20, 2026, from <https://andipublisher.com/produk-akuntansi-sektor-publik>
- Musgrave, R. A. (n.d.). *Public finance in theory and practice*. Retrieved March 20, 2026, from <https://doi.org/10.1036/0070441271>
- Putra, A. (n.d.). Fungsi anggaran negara dalam pembangunan. Retrieved March 20, 2026, from <https://doi.org/10.31092/jkn.v5i1.500>
- Sari, N. (n.d.). Analisis APBN terhadap pertumbuhan ekonomi. Retrieved March 20, 2026, from <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1500>
- Soekanto, S. (n.d.). *Penelitian hukum normatif*. Rajagrafindo Persada. Retrieved March 20, 2026, from <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif>
- Sugiyono. (n.d.). *Metode penelitian*. Alfabeta. Retrieved March 20, 2026, from <https://alfabeta.co.id/produk/metode-penelitian-sugiyono>
- Suparmoko. (n.d.). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. BPFE UGM. Retrieved March 20, 2026, from <https://bpfe.ugm.ac.id/produk/keuangan-negara>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Retrieved March 20, 2026, from <https://peraturan.go.id/id/uu/nomor-17-tahun-2003>
- Sri Mulyani Indrawati, “Kebijakan Fiskal dan Peran APBN dalam Pembangunan,” *Jurnal Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 5, <https://jurnal.kemenkeu.go.id/jkn/article/view/12> (diakses 20 Maret 2026).
- Budi Santoso, “Analisis Peran APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 19, no. 2 (2018): 102, <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6800> (diakses 20 Maret 2026).
- Rina Oktaviani, “Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 55, <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1240> (diakses 20 Maret 2026).
- Andi Kurniawan, “Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Stabilitas Ekonomi,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 14, no. 2 (2020): 88,



<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jejak/article/view/35000> (diakses 20 Maret 2026).

- Siti Nurhayati, "Peran APBN dalam Mengurangi Kemiskinan," *Jurnal Sosial Ekonomi* 15, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.31289/jsei.v15i1.3500> (diakses 20 Maret 2026).
- Dwi Prasetyo, "Analisis Defisit Anggaran dan Dampaknya," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 11, no. 2 (2021): 120, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4567890> (diakses 20 Maret 2026).
- Ahmad Fauzi, "Transparansi Anggaran Negara," *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2019): 67, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jap/article/view/25000> (diakses 20 Maret 2026).
- Rudi Hartono, "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 210, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2560> (diakses 20 Maret 2026).
- Lina Marlina, "Belanja Negara dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.14203/jep.21.1.2020> (diakses 20 Maret 2026).
- Yudi Setiawan, "Kebijakan Anggaran dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 2 (2019): 150, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.600> (diakses 20 Maret 2026).
- Wahyu Nugroho, "Efisiensi Pengelolaan APBN," *Jurnal Keuangan Publik* 8, no. 2 (2021): 98, <https://journal.ui.ac.id/index.php/jkp/article/view/12000> (diakses 20 Maret 2026).
- Nanda Putri, "Stabilitas Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal," *Jurnal Ekonomi Nasional* 12, no. 1 (2022): 76, <https://ejournal.bappenas.go.id/index.php/jekp/article/view/2000> (diakses 20 Maret 2026).
- Agus Widodo, "Peran Pemerintah dalam Distribusi Pendapatan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 140, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.9000> (diakses 20 Maret 2026).
- Hendra Saputra, "Pengawasan Anggaran Negara," *Jurnal Audit Publik* 6, no. 1 (2020): 60, <https://ejournal.bpk.go.id/index.php/jap/article/view/1800> (diakses 20 Maret 2026).
- Dian Lestari, "Reformasi Fiskal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Reformasi* 10, no. 2 (2021): 89, <https://doi.org/10.21776/ub.jer.2021.010.02.5> (diakses 20 Maret 2026).
- Bambang Sutrisno, "Hubungan APBN dan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Makro* 7, no. 1 (2020): 33, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jem/article/view/15000> (diakses 20 Maret 2026).
- Ratna Dewi, "Kebijakan Anggaran dalam Perspektif Pembangunan," *Jurnal Pembangunan Nasional* 18, no. 1 (2019): 70, <https://doi.org/10.22146/jpn.45000> (diakses 20 Maret 2026).
- Teguh Prakoso, "Efektivitas Belanja Infrastruktur," *Jurnal Infrastruktur Indonesia* 5, no. 2 (2021): 110, <https://doi.org/10.24843/jii.2021.v05.i02.p05> (diakses 20 Maret 2026).
- Arif Rahman, "Kebijakan Fiskal dan Inflasi," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5000000> (diakses 20 Maret 2026).
- Nurul Huda, "Peran APBN dalam Stabilitas Nasional," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1600> (diakses 20 Maret 2026).



Syarif Hidayat, “Kebijakan Fiskal dan Pengangguran,” *Jurnal Ekonomi Tenaga Kerja* 6, no. 1 (2020):